

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekatnya pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan tertuju pada sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dibarengi peningkatan pendapatan perkapita dan semakin kecilnya rentang perbedaan distribusi pendapatan serta semakin meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan akan terwujud apabila didukung oleh peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi maupun daya dukung eksternal (global regional maupun nasional) serta internal (kondisi wilayah, potensi daerah) dalam rangka mendukung lajunya pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menguatkan sendi-sendi perekonomian masyarakat lokal yang berkesinambungan dan bersinergis pada penguatan ekonomi daerah dengan mengedepankan akselerasi potensi yang dimiliki daerah melalui pengembangan potensi yang sesuai dengan prospek dan karakteristik daerah. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan dan pembenahan pembangunan fisik maupun non fisik yang secara signifikan terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan ekonomi daerah..

Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang kepariwisataan mengandung ketentuan yang meliputi; wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, usaha pariwisata, dan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, dan menteri kepariwisataan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan, unsur-unsur dasar kepariwisataan yakni; politik pemerintah, perasaan ingin tahu dari manusia, sifat ramah tamah, publisitas dan promosi, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, jarak dan waktu, promosi dan kesempatan berbelanja. Melalui pembanguna disegala sektor dan secara umum bahwa pariwisata meliputi bidang kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan seni serta ilmu pengetahuan modern.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 dan 23 tahun 2000 dan PP No. 105 tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah mengikuti paradigma yang berkembang dalam pengelolaan keuangan modern yang dapat diterapkan oleh pemerintahan daerah. Perubahan paradigma sering dengan perencanaan konsep good goverment dalam setiap penyelenggaraan pemerintah disegala sektor, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni dengan berpedoman pada prinsip; a) transparansi, b) efisiensi, c) efektifitas, d) akuntabilitas, e) partisipatif dalam penyusunan, pelaksanaan dengan pertanggung jawaban APBN maupun APBD.

Ditinjau dari segi pengelolaan keuangan daerah dan aspek ekonomi, pariwisata meliputi berbagai macam usaha bisnis besar maupun kecil, sehingga

pariwisata adalah sebuah industri yang mencakup lapangan usaha bisnis sangat luas dan mempunyai sifat rumit berganda. Dengan kata lain pembangunan pariwisata dengan benar dan tepat akan menciptakan peningkatan pendapatan dan devisa yang besar bagi daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi angkatan kerja.

Kemajuan perolehan pendapatan perkapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan disegala sektor. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup berperan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah, yang turut meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah ditunjang dari sektor pariwisata melalui retribusi penginapan atau persinggahan atau vila dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi rumah makan dan retribusi hiburan.

Pembangunan sektor pariwisata meliputi unsur-unsur dasar pariwisata guna menunjang kebutuhan wisata domestik sehingga mendorong wisatawan untuk lama menginap dan menghabiskan pendapatan wisatawan. Harapan pembangunan di sektor pariwisata adalah untuk dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam bidang budaya, kerajinan dan seni serta dapat menyerap angkatan kerja disektor pariwisata, yang bekerja pada industri perhotelan dan tempat-tempat obyek wisata.

Tabel 1.1
Data Potensi Obyek Pariwisata di Kabupaten Belu
Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Potensi Obyek Wisata
1.	Raimanuk	Gunung mandeu, kuan lulik, rumah adat kalu hane.
2.	Tasifeto Barat	Wemer, kolam alam ninle'at, rumah adat raioan.
3.	Kakuluk Mesak	Pasir putih, kolam susuk, teluk gurita, pantai aufuik, pantai sukaerlaran atapupu.
4.	Kota Atambua	Taman kota.
5.	Atambua Barat	Bukit lidak, bukit raimaten.
6.	Atambua Selatan	Gua mahanu, Kolam renang tirta.
7.	Tasifeto Timur	Dam sirani, bendungan haekrit
8.	Raihat	Mata air webot, air terjun uluktil, kampong lama asu eman.
9.	Lasiolat	Sumber air lahusus, air terjun mauhale, gereja tua lahusus.
10.	Lamaknen	Gunung lakaan, fulan fehan, kampung adat kewar, istana bere talo, benteng kikit.
11.	Lamaknen Selatan	Hutan dan bukit sia rai, rumah adat uma metan, kampug adat nualain, gereja tua nualain.
12.	Nunaet Nubesi	Bukit dubesi, rumah adat lahoan, rumah adat umametan lawalu.

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Belu

Data di atas terlihat bahwa Kabupaten Belu potensial di bidang pariwisata alam dan budaya yang jika dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli

daerah serta berdampak positif bagi masyarakat yang berada di daerah obyek wisata.

Kabupaten Belu juga merupakan salah satu daerah yang dianggap mempunyai potensi daerah yang dapat digunakan sebagai penyelenggaraan obyek pariwisata. Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah wisatawan dari tahun 2015-2017 yaitu sebagai berikut;

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Obyek Wisata Kabupaten Belu Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan	Obyek Wisata
2013	4.000	Teluk gurita, pantai sukaerlaran
2014	4.050	Gua mahanu, sumber air lahusus, pantai pasir putih
2015	5.746	Pantai pasir putih, kolam susuk, Pantai aufui, pantai sukaerlaran atapupu
2016	6.805	Teluk gurita, pantai pasir putih, taman kota
2017	8.112	Fulan fehan, air terjun mauhale, gua mahanu, sumber air lahusus

Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Belu

Di Belu paling tidak ada 51 obyek wisata, baik wisata alam dan rekreasi, wisata sejarah dan purbakala, wisata ritual, ziarah, spiritual, maupun agrowisata atau wisata pertanian. Namun tidak semua arena wisata itu dikenal masyarakat dan laku dijual serta mendatangkan pengunjung. Dari 51 obyek wisata itu, ternyata hanya sekitar 22 obyek wisata saja yang efektif. Dan ini

diperlukan usaha dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan obyek-obyek yang tidak efektif menjadi suatu obyek yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sehingga dapat menjadikan sektor yang potensial bagi daerah yang bertujuan untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi daerah Kabupaten Belu.

Table 1.3
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Belu

Tahun	Penerimaan sektor pariwisata	PAD	Kontribusi (%)
2015	30.698.798.956	163.397.838.000	13,29
2016	45.763.368.951	238.825.000.000	21,41
2017	50.595.734.791	267.914.250.000	19,21

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belu

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD masih mengalami fluktuasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan sektor pariwisata Kabupaten Belu terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi yang dicapai pada tahun 2016 sebesar 21,41 persen, dan nilainya terus menurun sampai pada tahun 2017 sebesar 19,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Belu belum optimal dan efektifnya kerja Dinas Pariwisata belum jug yang maksimal

terhadap Pendapatan Asli Daerah karena disetiap tahun mengalami fluktuasi dan belum adanya kesadaran warga untuk membayar pajak dan retribusi.

Selain tabel diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu dapat dilihat melalui tabel 1.4 dibawah ini

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha, Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Belu Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rp.)		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Pertanian	732.904,35	798.268,59	858.913,33
1.1.Pertanian Tanaman Pangan	392.708,12	416.650,30	447.371,85
1.2.Tanaman Perkebunan Rakyat	55.199,47	66.230,37	76.194,60
1.3.Peternakan	267.862,335	296.973,40	313.414,51
1.4.Kehutanan	6.071,44	6.512,91	7.061,43
1.5.Perikanan	4.160,05	4.376,52	6.128,86
2.Pertambangan dan Peggalian	38.715,20	45.618,76	52.481,57
3.Industri Pengolahan	1.297.196,13	1.426.666,56	1.631.811,81
4.Listrik,Gas Dan Air	47.252,56	68.873,45	83.450,08
5.Bangunan	61.052,56	71.804,65	83.659,60
6.Perdagangan	453.918,33	2,8503.434	553.148,89
7.Angkutan Dan Perhubungan	81.970,22	90.764,36	100.908,40
8.Lembaga Keuangan,Sewa bangunan dan Jasa Persewaan	93.619,54	113.462,34	134.560,33
9.Jasa-Jasa	354.689,95	394.819,14	431.536,47
PDRB	3.154.415,48	3.506.185,51	3.921.728,32

Sumber :BPS Kabupaten Belu

Bertolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul : ”Analisis Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Belu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Belu dari tahun 2013-2017?
2. Bagaimana efektifitas pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Belu dari tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Belu dari tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui efektifitas pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Belu dari tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi pemerintah Kabupaten Belu dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat untuk pengembangan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak Dinas Pariwisata dalam menentukan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan obyek wisata sebagai sumber pendapatan pada sektor pariwisata di Kabupaten Belu.